

Amien Rais mengatakan, DPR cenderung kembali menjadi stempel pemerintah. Kerisauan Amien Rais agaknya bermula dari kurang kritisnya DPR dalam menyikapi kebijakan pemerintah dalam beberapa isu strategis semacam kenaikan harga BBM dan kebijakan impor beras. Di satu sisi, saya relatif mengamini pernyataan Amien Rais meski di sisi lain saya juga mempertanyakan mengapa Partai Amanat Nasional, yang sedikit banyak masih berada di bawah bayang-bayang Amien Rais, ikut-ikutan menjadi stempel dari berbagai kebijakan pemerintah.

Pengalaman kita sebagai bangsa telah lengkap menghadirkan potret relasi presiden dengan parlemen. Di masa Presiden Soeharto, hubungan presiden-DPR amatlah kolutif. Presiden seakan atasan langsung DPR. Apa pun kebijakan Soeharto akan disambut paduan suara yes man di DPR dan MPR. Akibatnya, Soeharto bertahan hingga lebih dari 32 tahun. Pada ekstrem lain, di masa Presiden Abdurrahman Wahid, relasi presiden-parlemen amat konfrontatif. Presiden Wahid gagal membangun dukungan yang solid di DPR. Sebaliknya, ia terus berkonflik dengan parlemen. Akibatnya, masa kepresidenan Wahid hanya satu setengah tahun. Baik hubungan yang kolutif maupun konstruktif sama-sama bukan relasi ideal antara presiden dan parlemen. Keduanya seharusnya membangun hubungan yang saling kontrol dan saling imbang (checks and balances), yaitu hubungan yang konstruktif untuk bersama-sama mendorong agenda pembangunan bangsa dengan tetap membuka pintu bagi perbedaan pendapat dan ruang untuk saling mengingatkan. Relasi yang konstruktif itulah yang sedikit banyak terjadi di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebagai presiden minoritas (minority president), SBY yang hanya didukung modal awal tujuh persen suara di DPR cukup berhasil mengelola irama konfliknya dengan DPR.